

**EFEKTIVITAS BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KELURAHAN
MALALAYANG SATU BARAT KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

**EIRENE KAAWOAN
JOORIE RURU
HELLY KOLON DAM**

eirenekaawoan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of Assistance for Micro Business Actors (BPUM) in Malalayang Satu Barat Village, Malalayang District, Manado City. By using qualitative research methods, this research focuses on the effectiveness of providing assistance to the community in the West Malalayang Satu Village. The research study was conducted using the theory of Campbell J.P (in Starawaji 2009:121) which said that the measurement of effectiveness in general can be seen from: Program success; Target Success; Satisfaction with the Program; Achievement of Program Objectives; and Input and Output Levels. From the results of the study, it was found that the success of the Government Assistance Program for Micro Business Actors in Malalayang Satu Barat Village had not been successful as a whole, in terms of the distribution of assistance to recipients has been running according to the mechanism regulated by the government and the appointed bank, but there are still some problems that need to be addressed. the government must answer and resolve it, such as beneficiaries who do not have businesses, there are also those who should have the right but their names are not listed as potential beneficiaries.

Keywords: Effectiveness; Government Assistance; Micro Business

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini di fokuskan pada efektivitas pemberian bantuan untuk masyarakat di Kelurahan Malalayang Satu Barat. Kajian penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dari Campbell J.P (dalam Starawaji 2009:121) yang mengatakan bahwa, pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari: Keberhasilan Program; Keberhasilan Sasaran; Kepuasan Terhadap Program; Pencapaian Tujuan Program; dan Tingkat Input dan Output. Dari hasil penelitian didapati bahwa Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat belum berhasil secara keseluruhan, dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk, namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas; Bantuan Pemerintah; Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Kota Manado merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pelaku usahamikro kecil menengah dari berbagai bidang usaha, mengingat kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara sehingga perputaran ekonomi di kota ini sangat cepat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Salah satu daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM adadi Kecamatan Malalayang, dimana bila dilihat sepintas dipinggiran jalan malalayang terdapat usaha-usaha seperti warung, rumah makan, penjual pulsa dan usaha-usaha kecil lainnya. Oleh sebab itu dalam penerapannya seyogyanya banyak penerima BPUM yang adalah pelaku usaha kecil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penuturan Kadiskop dan UMKM Sulawesi Utara, sampai 30 November 2020 terdapat 14.607 UMKM telah mendaftar dan memasukkan data sebagai penerima insentif. Dana bansos produktif yang diberikan senilai Rp2.400.000,00 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah modal para pengusaha mikro, kecil, menengah di tengah pandemi Covid-19 sehingga usahanya terus berjalan. Di Kelurahan Malalayang Satu Barat sendiri berdasarkan data awal peneliti terdapat 577 pelaku usaha yang berdomisili di kelurahan tersebut, namun dari data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado jumlah penerima di Kelurahan Malalayang Satu Barat hanya sebanyak 486 yang artinya masih ada beberapa UMKM yang tidak menerima bantuan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mempersempit lokus (lokasi penelitian) yakni hanya pada Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang, hal ini dipertimbangkan karena Kelurahan Malalayang Satu Barat lebih dominan memiliki pelaku usaha kecil menengah sehingga penelitian ini dapat lebih valid terhadap data dan informasi yang digunakan.

Namun berdasarkan pengamatan

peneliti dilapangan, peneliti menganalisis mengenai beberapa permasalahan seperti penerima bantuan tidak mengetahui waktu kapan menerima bantuan tersebut yang hanya dapat dilihat melalui aplikasi serta waktu pendaftaran untuk menerima bantuan. Selanjutnya masalah dalam Ketepatan sasaran penerima yang tidak jelas dimana ada penerima yang memiliki status social kaya dan ada yang layak menerima namun tidak menerima, kemudian masalah pemerintah kelurahan yang tidak dapat berbuat apa-apa dalam menjalankan perintah yakni mereka tidak dapat menentukan penerima melainkan hanya diminta mendata saja meski hasilnya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh dinas koperasi dan UMKM. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang mendaftar melalui dinas dan juga ada yang melalui kelurahan sehingga membingungkan masyarakat. Yang juga menjadi permasalahan adalah ketepatan sasaran selain tidak semua mendapatkan bantuan, terdapat beberapa masalah terkait penyaluran BPUM seperti ada penerima yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri. Bahkan kebanyakan penerima bantuan tidak memiliki usaha, sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM.

Masalah selanjutnya yang saya dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima danabantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan.

Disamping itu tujuan program yang masih belum dipahami oleh banyak masyarakat menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka mensukseskan program tersebut. Selain itu masih ada beberapa masyarakat Kelurahan Malalayang Satu Barat yang belum puas dengan program tersebut dilihat dari segi

keadilan, ketepatan sasaran dan juga output dari pemberian bantuan tersebut yang banyak digunakan oleh masyarakat penerima bukan untuk usaha namun hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Masalah lainnya adalah Calon penerima BPUM untuk UMKM banyak yang mengeluhkan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak sesuai dengan nama yang tertera pada daftar penerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut. Akibatnya, pencairan dana bantuan itu pun terhambat. Pihak bank penyalur, meminta agar para pelaku UMKM memperbaiki terlebih dahulu nama yang tertera, agar sesuai dengan nama yang memiliki NIK tersebut. Sayangnya, birokrasi yang panjang, membuat masyarakat akhirnya memilih menyerah

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu penulis menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai tolak ukur bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

Penelitian pertama, Metusala Sarefee, Michelle Kembuan, Florence Lengkong, Helly Kolondam (2018), dengan topik Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala.

Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati namun kenyataannya kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal, oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dimana dalam implementasi kebijakan dilihat dari 6 variabel yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan. Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil. Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara kepada 7 orang informan, observasi secara langsung dan penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan kebijakan, bahkan dalam penelitian dibantu dengan adanya pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian Kedua Yolanda Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru (2015), dengan topik Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara).

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu kebijakan

yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan sesuai dengan undang-undang no.20 tahun 2008 mengatur usaha mikro, kecil dan menengah, serta dengan peraturan pemerintah no. 13 tahun 2013 pada pelaksanaan undang- undang nomor 20 tahun 2008, pemerintah membuat kebijakan tentang program-program pembangunan dari usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah pemerintah memberikan izin usaha dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu; pengembangan bisnis melalui pemberian fasilitas, pembinaan dan pendampingan; bantuan untuk membina dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha; koordinasi dan pengawasan pemerintah. Mikro kecil dan menengah kebijakan juga telah diberlakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kawangkoan Utara. usaha mikro di kabupaten Kawangkoan utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan, menganalisis, dan menentukan efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Ketanggapan, (2) Perkembangan, (3) Kecukupan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah BUMD di kecamatan Kawangkoan utara sudah cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, adalah menyarankan kepada pemerintah kabupaten Kawangkoan utara untuk lebih memperhatikan kebutuhan mikro usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

Penelitian ketiga Kania Suryaningrum. Masje Pangkey, Burhanuddin Kiyai (2015), dengan topik Efektivitas Pelaksanaan

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah) (Suatu Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah Kota Manado)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan studi pustaka dan kerja lapangan (wawancara, observasi dan studi dokumentasi). Adapun responden/informan penelitian ini adalah Kepala Dinas mikro kecil dan menengah Kota Manado: 3 sub bidang usaha mikro kecil dan menengah: 6 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah kota manado. dengan teknik analisis data dalam reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (mikro kecil menengah) (a studi di jurusan koperasi dan mikro kecil menengah manado) dalam ukuran konsep menurut gibson (1984), yaitu produksi, efisiensi, kepuasan pelanggan, adaptasi, dan pengembangan. Dilihat dari kelima aspek tersebut yaitu produksi, efisiensi, kepuasan pelanggan, adaptasi, dan pengembangan hampir semuanya dikatakan belum berjalan dengan baik.

KONSEP TEORI

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, (Wojowisoto, 1980:89).

Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko

berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk (2006:38) dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektifitas.

Tjokroamidjojo dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektifitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Campbell J.P (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan Program, ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keberhasilan Sasaran, ditinjau dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan sasaran dari kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan Terhadap Program, ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Tingkat *Input* dan *Output*, ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*Input*) dengan keluaran (*Output*). Jika *Output* lebih besar dari *Input* maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* dapat dikatakan efektif.
5. Pencapaian Tujuan Program, ditinjau dari sejauhmana keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang menjadi focus pada penelitian ini adalah Efektivitas pemberian Bantuan untuk masyarakat di Kelurahan Malalayang Satu Barat dengan menggunakan teori teori dari Campbell J.P (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Pencapaian Tujuan Program
5. Tingkat Input dan Output

Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (pihak terkait) yang memungkinkan memberikan data dalam penelitian yaitu :

- Lurah Malalayang Satu Barat 1 Orang
- Perangkat Kelurahan 2 Orang
- Masyarakat penerima BPUM 4 Orang
- Masyarakat yang tidak menerima 3 Orang

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni:

1. Observasi
2. Wawancara

3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data
3. Penyajian Data

PEMBAHASAN

Focus dalam penelitian ini adalah Efektivitas pemberian Bantuan untuk masyarakat di Kelurahan Malalayang Satu Barat dengan menggunakan teori dari Campbell J.P (dalam Starawaji, 2009:121) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan Program

Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil revidi dari

APIP maupun hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran 2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai program BPUM di Kelurahan Malalayang Satu Barat, peneliti melihat menilai bahwa penyelenggaraan program tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil dikarenakan masih terjadinya sejumlah permasalahan mengenai penentuan yang akan menerima bantuan, berdasarkan informasi dari informan yang tidak menerima bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menerima dan seharusnya layak untuk menerima.

Namun dari sisi penyaluran untuk penerima bantuan bagi yang telah terdaftar sebagai calon penerima, program ini dapat dikatakan berhasil, dimana setiap nama yang keluar dari keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eforbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari segi penggunaan anggaran oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima bantuan pemerintah tersebut, jawaban informan memiliki beragam jawaban, ada yang memang menggunakan untuk keberlangsungan usaha namun ada juga digunakan untuk keperluan sehari-hari karena memang penerima tersebut tidak memiliki usaha atau bekerja sebagai karyawan.

2. Keberhasilan Sasaran

BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemic Covid 19 dengan nilai Rp2,4

juta per pelaku usaha mikro. Sementara KUR Super Mikro dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang sedang berusaha dan karyawan yang terkena PHK dengan memberikan pinjaman murah tanpa bunga.

Mirrlees (1971) menyebutkan bahwa informasi yang jelas diperlukan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dalam penggunaan uang publik. Melalui pendekatan berbasis informasi (*information-based approach*), Mirrless menyebutkan bahwa bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat, terhindar dari asimetris informasi (*adverse selection*) dan juga penerima menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, terhindar dari penyimpangan moral (*moral hazard*).

Ketepatan target penerima dan pemanfaatan bantuan tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Payung besar program ini termaktub pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PP ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' usaha dan meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para informan mengenai ketepatan sasaran program Bantuan pemerintah bagi pelaku usaha di Kelurahan Malalayang Satu Barat, belum sepenuhnya tepat sasaran, sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah jelas untuk pelaku usaha mikro

terutama yang terkena dampak akibat pandemi covid 19. Namun pada kenyataannya di lapangan yakni di Kelurahan Malalayang Satu Barat masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah kelurahan ternyata kewenangan pemerintah kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan arahan Presiden RI, prioritas dari program BPUM itu sendiri diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dengan transaksional harian dan selama ini tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh lembaga formal, khususnya perbankan. Sehingga tidak seluruh UMKM di Indonesia merupakan target dari program BPUM, melainkan para pelaku usaha mikro dengan modal dan transaksi harian yang jumlahnya tidak terlalu besar.

Namun dari penelusuran data online peneliti mendapati bahwa salah satu masalah dalam program BPUM adalah belum sepenuhnya tepat sasaran. berdasarkan audit yang dilakukan BPK pada tahun 2020 ditemukan adanya ketidaktepatan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,18 Triliun. Tercatat pula Rp91,8 Miliar dari total bantuan tersebut ternyata diberikan kepada penerima yang sudah meninggal dunia. Total penerima yang sudah meninggal diantaranya sebanyak 38,2 ribu penerima. Selain ketidaktepatan penyaluran bagi orang yang sudah meninggal, temuan dari hasil audit BPK juga menunjukkan fakta baru bahwa 414.613 penerima tidak sesuai kriteria dan SK serta mengalami duplikasi.

3. Kepuasan Terhadap Program

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk

UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Walau fenomenanya baru muncul, beberapa studi sudah mencoba menganalisis pengaruh bantuan pemerintah pada UMKM di masa Covid-19. Kalemli-Ozcan et al. (2020) meneliti hal ini di tujuh belas negara. Mereka memperkirakan bahwa tanpa dukungan pemerintah kegagalan UMKM meningkat hampir 9 persen. Risiko pekerjaan UMKM juga 3,1% lebih tinggi dari sektor swasta. Kalemli-Ozcan et al. juga mengevaluasi biaya dan efektivitas berbagai intervensi kebijakan. Biaya fiskal dari intervensi yang menargetkan UMKM jauh lebih murah daripada subsidi biasa (1,82% dari PDB).

Studi seperti ini belum ditemukan dalam konteks Indonesia. Di sinilah studi ini berperan. Target dan distribusi kebijakan yang jelas dan terukur memang menjadi kunci efektivitas PEN pada cluster UMKM. Mirrlees (1971) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan keuangan publik mengacu pada apakah bantuan pemerintah diterima oleh target yang tepat (terhindar dari adverse selection) dan digunakan sesuai dengan peruntukannya (terhindar dari moral hazard).

Kepuasan dari penerima bantuan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan

program ini. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah (i) kepuasan pada skema bantuan; (ii) nilai bantuan; (iii) prosedur penyaluran; (iv) kriteria; (v) kecepatan; dan (vi) kesediaan penerima untuk merekomendasikan program pada orang lain (Rhee, S. K., & Rha, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mengenai kepuasan mereka akan program pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang peneliti mendapatkan bahwa penerima bantuan merasa puas mengenai program pemerintah, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah tersebut tergolong populer di mata masyarakat dimana masyarakat menerima bantuan secara langsung tanpa melalui tahapan yang membingungkan dan syarat yang sangat mudah.

4. Pencapaian Tujuan Program

Dalam setiap kebijakan ada juga kemungkinan terjadinya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, akan tetapi masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sementara exclusion error adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sebabnya dapat bermacam-macam. Di antara yang didokumentasikan oleh literatur adalah akses terhadap informasi baik dalam konteks ketimpangan internet (internet inequality) (Noh dan Yoo, 2008; Salemink et al., 2017) dan jarak dengan informasi (proximity) (Bennett et al., 2018). Namun memastikan bantuan sampai pada target yang tepat bukanlah satusatunya ukuran efektivitas program.

Dampak yang ditimbulkan kepada kehidupan pelaku UMKM juga perlu dipelajari. Dampak ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni (i)

dampak ekonomi dan (ii) dampak sosial dan kesehatan mental. Di antara dampak ekonomi yang berlu dilihat dari penerapan bantuan UMKM adalah (i) ketahanan UMKM; (ii) employee retention; (iii) penjualan; dan (iv) adaptabilitas (Kalemlı-Ozcan et al., 2020). Sedangkan dari sisi sosial dan kesehatan mental dapat ditinjau dengan melihat dampaknya pada (i) kecemasan; (ii) optimism; (iii) ranjau hutang; dan (iv) pengakuan atas kehadiran negara.

Secara nasional, di lihat pada laman <https://kemenkopukm.go.id>. Berdasarkan survey oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261 responden, menunjukkan bahwa 88,5 persen penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. Disamping itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4 persen dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukkan bahwa 44,8 persen responden menyatakan bahwa kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selanjutnya 51,5 persen responden menyatakan bahwa usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM),"

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden yang di survei menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) lebih dari 50%

(mayoritas UMKM) merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hal ini disebabkan dana yang diperoleh dari program BPUM di pergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58% membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usahanya.

Hasil berbagai survei sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan resiko sosial di kemudian hari.

Di kelurahan malalayang satu barat berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai tujuan dari program BPUM peneliti menyimpulkan bahwa tujuan program yang dicanangkan oleh presiden jokowi adalah dengan bantuan tersebut untuk meningkatkan produktifitas para pengusaha UMKM ditengah adaptasi kebiasaan baru, Kelurahan malalayang satu barat sejauh ini tujuan bantuan pemerintah terhadap UMKM tersebut dapat dikatakan berhasil dimana para UMUM yang ada di Kelurahan malalayang satu barat hingga saat ini masih bertahan dengan usaha mereka pada masa pandemi covid 19 ini.

5. Tingkat *Input* dan *Output*

Ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*Input*) dengan keluaran (*Output*). Jika *Output* lebih besar dari *Input* maka dapat dikatakan tidak efektif

dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* dapat dikatakan efektif. Dalam kegiatan pemerintah persoalan input adalah bagaimana kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan output bagaimana masyarakat yang menjadi sasaran program mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut.

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai secara maksimal, diperlukan penertahanan, baik dalam arti penertahanan pencapaian bagian-bagiannya maupun penertahanan dalam arti periodisasinya. Efektivitas berhubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Tercapainya tujuan tersebut telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut. Target dalam Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) yaitu untuk pelaku usaha mikro untuk membantu dan menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi covid-19 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta penyelamatan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti membandingkan antara pelaksanaan program di BPUM di Kelurahan Malalayang Satu barat dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dapat tersalurkan, dan kepuasan masyarakat yang menerima manfaat merasa puas dengan apa yang didapatkan peneliti menilai output yang didapatkan dari masyarakat lebih besar dari input, maka dapat dikatakan program ini di Kelurahan Malalayang Satu Barat sudah efektif.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat belum berhasil secara keseluruhan, dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.
2. Ketepatan Sasaran penerima bantuan BPUM belum sepenuhnya efektif, hal ini disebabkan tidak semua masyarakat yang layak menerima bantuan di Kelurahan Malalayang Satu Barat menerima bantuan tersebut, dan sebaliknya ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi syarat malah menerima bantuan tersebut.
3. Kepuasan Terhadap Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan dari hasil penelitian disimpulkan sebagian besar masyarakat puas terhadap program tersebut, hal tersebut karena sifat program tersebut dimana masyarakat hanya mendapatkan bantuan uang tanpa adanya syarat yang berat dan tidak perlu dikembalikan.
4. Pencapaian Tujuan Program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha di Kelurahan Malalayang dapat dikatakan cukup berhasil, dimana tujuan utama program BPUM adalah untuk meningkatkan produktifitas UMKM agar mampu bertahan di tengah masa pandemi covid-19 dan di Kelurahan Malalayang Satu Barat masih banyak UMKM yang masih bertahan melaksanakan kegiatan usaha mereka.
5. Output yang dihasilkan pada implementasi bantuan pemerintah bagi

palku usaha di Kelurahan Malalayang Satu barat lebih besar dari pada input, hal tersebut terlihat dari respon masyarakat dengan adanya bantuan pemerintah tersebut serta efek yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa program BPUM yang dilaksanakan di Kelurahan Malalayang Satu Barat tergolong sudah efektif.

SARAN

1. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan syarat penerima serta pentingnya koordinasi dilakukan antara pemerintah kelurahan, kecamatan dan dinas koperasi dan UMKM Kota Manado agar supaya pertanyaan masyarakat akan permasalahan seputar BPUM dapat terjawab dengan baik. Dengan demikian masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi terkait dengan program bantuan pemerintah tersebut.
2. Perlu adanya pengambilan data masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan dinas koperasi dan UMKM Kota Manado, sehingga input data sesuai dengan data yang nyata dilapangan bukan berdasarkan data lama yang diinput kembali. Agar bantuan pemerintah bagi pelaku usaha dapat disalurkan tepat sasaran,
3. Perlu dipertahankan kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah dan baiknya dilakukan survey kepuasan masyarakat seutuhnya mengenai program tersebut, dan pemerintah kelurahan dan dinas koperasi tetap menjalankan program bantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Pentingnya dilakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai hasil dari bantuan

tersebut untuk pelaku usaha mikro tersebut, apakah betul-betul membantu pelaku usaha tersebut atau tidak. Untuk memastikan tujuan program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro berhasil.

5. Pemerintah Kelurahan perlu membuka posko pengaduan masyarakat baik tingkat kelurahan maupun tingkat desa guna menjamin aspirasi dan pendapat masyarakat dapat diterima dan dapat disalurkan ke tingkatan yang lebih tinggi yakni ke pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota Manado sehingga akan diadakan langkah perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Bintarto. 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Dunn, William N. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James, L., 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang .2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen Personalial Sumber Daya Manusia*, Edisi. Kedua, Yogyakarta, Penerbit: BPFE.

- Kania Suryaningrum, Masje Pangkey, Burhanuddin Kiyai. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Manado)* Jurnal Administrasi Publik Unsrat.
- Michelle Kembuan, Florence Lengkong, Helly Kolondam. 2018. *Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di kecamatan Tikala*. Jurnal Administrasi Negara. Unsrat
- Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Lubis & Husain, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Midgley, James 2005, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan* diterjemahkan oleh Fathrusyah, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins Stephen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Siagian Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan Belas.PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Steers, Richard, 2008, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Steers, Richard.M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku* (Alih Bahasa.Magdalena). Jakarta: Erlangga
- Soetjipto, Noer. 2020. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media
- Starawaji. 2009. *Corporate Social Responsibility dalam Praktek Di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Diktat) Suud, Mohammad, 2006. *3 orientasi kesejahteraan sosial*, Prestasi Pustaka
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal Brand. Vol. 2(1) 147-153
- Tambunan, Tulus, 2012. “*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*”, Jakarta : LP3ES
- Todaro, Michael. P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit Balai Pustaka
- Yolanda Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru. 2015. *Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara)*. Jurnal Administrasi Negara. Volume 2. Nomor 30 Unsrat

Sumber Lain:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Menteri Bandung : Penerbit Balai *Pustaka*